



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS IB



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025



#bangga
melayani
bangsa

#Ber
AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

f PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

@pngunungsitoli



info@pn-gunungsitoli.go.id



(0639) 21344- fax (0639) 21343



Jln.Pancasila no.12 Kota Gunungsitoli



www.pn-gunungsitoli.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025 selesai disusun. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas atas aktualisasi kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama tahun 2025 kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif.

Laporan tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2025 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam satu tahun terakhir. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian Informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Pada awal tahun 2025 lalu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhasil meraih prestasi gemilang yakni Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan Nilai Akreditasi "A" (Excellent) yang berlaku selama 1 (satu) tahun atau 1 (satu) periode. Hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan namun juga sekaligus sebagai cambukan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar dapat terus melaksanakan pelayanan publik dan kinerjanya dimasa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli : "SOKHI" yang berasal dari bahasa daerah Nias. Secara terminologi "SOKHI" memiliki arti "BAGUS", bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sendiri "SOKHI" merupakan akronim dari ; "Santun Objektif Kredibel Harmonis Inovatif".

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2022 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.137/KPN/SK/KP.04.10/12/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2022.

Demikian Laporan Tahunan kegiatan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2025, kami sampaikan semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih terpacu menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum pada tahun 2025, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kepulauan Nias khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Gunungsitoli, 4 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Zulfadly, S.H., M.H.
NIP 197605222001121001

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B	4
D. Budaya Kerja	5
E. Motto	6
F. Rencana Strategis (RENSTRA)	6
Bab II Keadaan Perkara di Peradilan umum	8
A. Keadaan Perkara di Peradilan umum	8
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	8
2. Keadaan Perkara Tingkat banding	8
3. Keadaan Perkara tingkat Kasasi	9
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
B. Penyelesaian Perkara	9
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	10
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	10
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi	11
dan peninjauan kembalij	
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	12
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	13
1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)	13
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	14
3. Perkara Prodeo (pembebasan Biaya Perkara)	15
Bab III Sumber Daya Manusia	16
A. Mutasi	19
B. Promosi	19
C. Pensiun	19
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	20
E. Surat Keputusan	21
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	32
A. Pengelolaan Keuangan	32
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	34
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	36

	1. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum	36
	2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.....	38
Bab V	Peningkatan Pelayanan Publik	39
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	39
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	47
	C. Inovasi Pelayanan Publik	47
Bab VI	Pengawasan	52
	A. Internal	52
	B. Evaluasi.....	53
Bab VII	Penutup.....	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Rekomendasi.....	56
LAMPIRAN		
	A. SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama	8
Tabel 2. Keadaan Perkara di Tingkat Banding	8
Tabel 3. Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi	9
Tabel 4. Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali	9
Tabel 5. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tahun 2025	10
Tabel 6. Jumlah Perkara Perdata yang Putus tahun 2025	10
Tabel 7. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	10
Tabel 8. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	10
Tabel 9. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	11
Tabel 10. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	12
Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi.....	12
Tabel 12 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diversi	13
Tabel 13. Penyerapan Anggaran POSBAKUM di PN Gunungsitoli.....	14
Tabel 14. Penyerapan Anggaran Sidang Keliling di PN Gunungsitoli	15
Tabel 15. Penyerapan Anggaran Perkara Prodeo di PN Gunungsitoli.....	16
Tabel 16. Profil SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli	17
Tabel 17. Data Mutasi Aparatur PN Gunungsitoli	17
Tabel 18. Data Promosi Aparatur PN Gunungsitoli	18
Tabel 19. Data Pensiun Aparatur PN Gunungsitoli.....	18
Tabel 20. Data Diklat Aparatur PN Gunungsitoli	18
Tabel 21. Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696 Tahun 2025	32
Tabel 22. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025	32
Tabel 23. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025	32
Tabel 24. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	32
Tabel 25. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198 Tahun 2025	33
Tabel 26. Pengadaan Tahun 2025	33
Tabel 27. Pemeliharaan Tahun 2025	33
Tabel 28. Penghapusan Tahun 2025	33
Tabel 29. Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2025	34
Tabel 30. Keadaan Rumah Dinas Tahun 2025	35
Tabel 31. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode November 2025.....	44
Tabel 32. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat	52
Tabel 33. Rekapitulasi Pengaduan di PN Gunungsitoli Tahun 2025.....	53



BAB I

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas untuk melaksanakan tugas non kedinasan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Untuk itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Penyusunan laporan tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada, baik itu personil maupun keadaan administrasi serta kondisi gedung dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih bersih, rapi teratur dan tertib.

Perumusan suatu kebijakan umum sangat memerlukan pedoman yang jelas agar setiap kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

Beberapa upaya yang telah diuraikan pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasaranan dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang berkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap prilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu;

Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B juga berpedoman pada kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas. Beberapa program prioritas tersebut, yaitu :

1. Program tunggakan minutasi nihil untuk melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara;
2. Program sistem pelayanan satu pintu (*one stopintergrated service*) atau dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan persidangan. Dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Program keterbukaan informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada website Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B “www.pn-gunungsitoli.go.id” serta menggalakkan dan membantu pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan upload putusan ke Direktori Putusan;
4. Program pengembangan sistem pengadilan yang akuntabel dan transparan dengan mengoptimalkan meja pelayanan terpadu serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli Keals I B;

5. Program sidang keliling terpadu “*one day service*” dalam hal memenuhi hak-hak identitas hukum terutama dalam perbaikan nama bagi masyarakat yang kurang mampu;
6. Program e-SKUM (elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar) yaitu aplikasi *web-based* yang dapat membantu para pihak untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara;
7. Program *Audio to Text Recording* (ATR) yaitu aplikasi persidangan pengadilan berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks pada proses persidangan, sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis terekam dalam bentuk teks. Aplikasi ATR ini sudah terintegrasi langsung dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
8. Pelaksanaan penyelesaian perkara mediasi serta implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sasaran akhir dalam Laporan Tahunan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu:

- a. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”.

Visi dimaksud bermakna untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu

perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B.

Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Seluruh Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
4. Keterbukaan Informasi kepada para Pencari Keadilan.

D. BUDAYA KERJA.

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparatur peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh dan taat kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Institusi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bersifat terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan;
15. Tidak menyimpang dan menyalahi prosedur yang berlaku.

Berdasarkan itu juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menerapkan 8 (delapan) Budaya Malu dalam bekerja. Adapun budaya malu tersebut adalah :

1. Malu terlambat masuk kantor dan pulang sebelum waktunya serta tidak mengikuti apel;
2. Malu tidak masuk kerja tanpa alasan atau keluar pada saat jam kerja;
3. Malu kerja tanpa terprogram, tidak bertanggungjawab dan terbengkalai;
4. Malu bekerja tidak berprestasi;
5. Malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor;
6. Malu tidak berpakaian rapi, tidak bertatakrama dan tidak berpakaian sopan santun;
7. Malu bermain, merokok dan membuat keributan pada saat jam kerja;
8. Malu tidak menjunjung tinggi, tidak menghargai dan tidak menjaga kehormatan korps.

E. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B adalah “**SOKHI**” yang dalam bahasa daerah Nias berarti “**BAGUS**” dan merupakan akronim dari “**Santun Objektif Kredibel Harmonis Inovatif**”.

F. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.*

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli maka dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan menungkingkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (*aces to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara akuntabel, efektif dan efisien.



BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

Pada tahun 2025 jumlah perkara yang masuk sebanyak 148 Perkara Pidana Biasa, 2 Perkara Singkat, 8 Perkara Pidana Cepat, 11 Perkara Pidana Anak, 3 Pra Peradilan,

Tabel 1.Keadaan Perkara Tingkat Pertama

a. Pidana

No	PERKARA PIDANA	JUMLAH					
		BIASA	PID.SUS ANAK	SINGKAT	BIASA	LANTAS	PRA PERADILAN
1	SISA TAHUN 2024	24	1	SISA TAHUN 2024	24	1	SISA TAHUN 2024
2	MASUK TAHUN 2025	148	2	MASUK TAHUN 2025	148	2	MASUK TAHUN 2025
3	PUTUS TAHUN 2025	151	3	PUTUS TAHUN 2025	151	3	PUTUS TAHUN 2025
4	SISA TAHUN 2025	21	4	SISA TAHUN 2025	21	4	SISA TAHUN 2025

b. Perdata

No	PERKARA PERDATA	JUMLAH			
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	GUGATAN
1	SISA TAHUN 2024	44	1	SISA TAHUN 2024	44
2	MASUK TAHUN 2025	95	2	MASUK TAHUN 2025	95
3	PUTUS/DILAKSANAKAN	104	3	PUTUS/DILAKS ANAKAN	104
4	SISA TAHUN 2025	35	4	SISA TAHUN 2025	35

2. Keadaan Perkara di Tingkat Banding

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Tabel 2.Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah
1	Perkara Pidana	2	26	28
2	Perkara Perdata	0	21	21

3. Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

Tabel 3.Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah
1	Perkara Pidana	0	21	21
2	Perkara Perdata	5	14	14

4. Keadaan Perkara di tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sebagai berikut :

Tabel 4.Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah
1	Perkara Pidana	1	3	4
2	Perkara Perdata	0	7	7

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Jumlah perkara pidana biasa, khusus, cepat, singkat, lalu lintas/tilang dan pra peradilan yang putus pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tahun 2021.

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Putus 2024	Sisa Perkara yang Belum Putus 2025
		Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah		
1	Pidana Biasa	24	148	172	1	Pidana Biasa
2	Pidana Khusus Anak	0	11	11	2	Pidana Khusus Anak
3	Pidana Cepat	0	8	8	3	Pidana Cepat
4	Pidana Singkat	0	2	2	4	Pidana Singkat
5	Pidana Lalu Lintas	0	1901	1901	5	Pidana Lalu Lintas
6	Pra Peradilan	0	3	3	6	Pra Peradilan

Jumlah perkara perdata yang putus pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Perkara Perdata yang Putus tahun 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Putus 2025	Sisa Perkara yang Belum Putus 2025
		Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah		
1	Perdata Gugatan	44	95	139	1	Perdata Gugatan
2	Perdata Gugatan Sederhana	5	22	27	2	Perdata Gugatan Sederhana
3	Perdata Permohonan	1	181	182	3	Perdata Permohonan

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara Pidana yang diputus tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu 2025	Sisa Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
		Sisa 2024	Masuk 2025		
1	Pidana Biasa	24	148	151	0
2	Pidana Khusus	0	11	11	0
3	Pidana Cepat	0	8	8	0
4	Pidana Singkat	0	2	2	0
5	Pidana Lalu Lintas	0	1901	1901	0
6	Pra Peradilan	0	3	3	0

Jumlah perkara perdata yang diputus tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu 2025	Sisa Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
		Sisa 2024	Masuk 2025		
1	Perdata Gugatan	44	95	51	70
2	Perdata Gugatan Sederhana	5	22	5	22
3	Perdata Permohonan	1	181	180	0

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara Pidana yang diajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2024	MSK THN 2025	JLH	DIKIRIM	SISA TAHUN 2025	KET
1	BANDING	2	26	28	27	1	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Permohonan Banding Bulan Desember Tahun 2024 yang berkasnya dikirim Januari 2025 - 24 Banding Perkara Pidana Biasa - 2 Banding Perkara Khusus Anak <p>Sisa 1 Permohonan Banding Tahun 2025 belum dikirim karena masih dalam tahap Inzage</p>
2	KASASI	0	21	21	21	0	<ul style="list-style-type: none"> - 19 Kasasi Perkara Pidana Biasa 2 Kasasi Perkara Khusus Anak
3	PENINJAUAN KEMBALI	1	3	4	3	1	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Permohonan PK Bulan Desember Tahun 2024 yang berkasnya dikirim Januari 2025 <p>Sisa 1 Permohonan PK Tahun 2025 belum dikirim karena masih dalam tahap Penerimaan Memori PK</p>
4	GRASI	0	0	0	0	0	-

Berdasarkan data tersebut maka jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sisa perkara pidana biasa tahun 2024 ditambah jumlah perkara pidana biasa tahun 2025 dikurangi jumlah berkas yang diajukan upaya hukum pada tahun 2025 kemudian dijumlahkan dengan berkas banding yang dicabut, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada Tahun 2025 adalah 126 (seratus dua puluh enam) berkas dengan detil sebagai berikut ;

- Jumlah Perkara Sisa Tahun 2024 : 24 Perkara
- Jumlah Perkara Masuk Tahun 2025 : 148 Perkara
- Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2025 : 46 Perkara
- Mencabut upaya Hukum di Tahun 2025 : NIHIL
- Tidak memenuhi syarat formil : NIHIL
- Total : 126 Perkara**

Jumlah perkara perdata yang diajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2024	MSK THN 2025	JLH	DIKIRIM	KET
1	BANDING	0	21	21	20	-
2	KASASI	0	14	14	10	-
3	PENINJAUAN KEMBALI	0	7	7	7	-

Berdasarkan data tersebut maka jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sisa perkara perdata gugatan tahun 2024 ditambah jumlah perkara perdata gugatan tahun 2025 dikurangi jumlah berkas yang diajukan upaya hukum pada tahun 2025, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah : 44 (empat puluh empat) berkas.

- Jumlah Perkara Sisa Tahun 2024 : 44 Perkara
- Jumlah Perkara Masuk Tahun 2025 : 95 Perkara
- Mengajukan Upaya Hukum : 42 Perkara
- Total : 97 Perkara**

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

No	Sisa Mediasi Tahun Lalu	Perkara Mediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi (2 + 3)	Penyelesaian Mediasi					Mediasi Berjalan (4- (8+9+10))	
				Berhasil				Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan
				Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah (5 + 6 + 7)			
1	0	40	40	1	0	0	1	36	2	1

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.

Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana yang Berhasil Diversi

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara yang Berhasil Melalui Diversi
		Sisa 2024	Masuk 2025	
1	Kesepakatan Diversi	0	0	0

Rekapitulasi perkara yakni menggambarkan keadaan perkara pidana dan perdata yang diterima dan diselesaikan selama tahun 2025. Untuk data lebih lanjut terdapat pada lampiran laporan tahunan ini.

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU

1. Posbakum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh lembaga peradilan dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama dengan tujuan untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advice hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memiliki Posbakum yang bekerjasama dengan LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias.

Beberapa layanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 25, yaitu :

- Pemberian informasi, konsultasi atau advis 14hukum;
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum.

Adapun tatacara pengajuan permohonan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2014 Pasal 32 yaitu :

- Pemohon mengisi formulir dan memberikan persyaratan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (2);
- Apabila penerima layanan Posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara maka petugas posbakum pengadilan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

c. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan disidang Pengadilan petugas memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar organisasi bantuan hukum.

Anggaran yang tersedia pada DIPA 099198 untuk pelaksanaan POSBAKUM sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Penyerapan anggaran Posbakum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli 100%, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 13. Penyerapan Anggaran POSBAKUM di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
36.000.000	36.000.000	0

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Peraturan ini juga yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan rangkaian yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pihak terkait. Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan bagian dari Pelayanan Publik yang Prima di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.

3. Perkara Prodeo

Pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2025 nihil. Sehingga anggaran DIPA yang telah tersedia penyerapannya 0% dikarenakan tidak ada masyarakat yang mendaftar perkara perdata secara prodeo (bebas biaya).

Adapun anggaran perkara prodeo termasuk pada DIPA 099198 yaitu sebagai berikut:

Tabel 14. Penyerapan Anggaran Perkara Prodeo di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
0	0	0



BAB III

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B III

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka Pembinaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Struktur dan Tata Organisasi Pengadilan Negeri Sungailiat maka dalam rangka pembinaan personil dan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Sungailiat memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk dan arahan untuk meningkatkan profesionalisme kerja.

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (Court Excellence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Gunung Sitoli mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Gunung Sitoli senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, maupun seluruh staf.

Aparatur Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam melaksanakan pekerjaan tentu diberikan target pekerjaan sesuai dengan Jabatan yang di emban oleh masing-masing aparatur, sehingga adanya keluaran atau capaian kinerja pegawai dapat terukur secara sistematis. Berikut Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tahun 2025 ;

Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Kegiatan Tahun 2025	Ket
1	ZULFADLY, S.H.,M.H	Ketua	17	
2	ALFAN PERDANA, S.H.	Wakil Ketua	8	
3	HENGKY ALEXANDER YAO, S.H.,M.H.	Hakim	8	
4	ROBERTO SIANTURI, S.H.	Hakim	8	
5	RIZAL GUNAWAN BANJARNAHOR, S.H.	Hakim	8	
6	BINSAR P.TAMPUBOLON, S.HL	Hakim	8	
7	GABRIEL LASE, S.H.	Hakim	8	
8	LEOTUA H.TAMPUBOLON, S.H.,M.H.	Panitera	16	
9	ERWIN HAREFA, SH	Sekretaris	7	
10	TRISMAN ZANDROTO	Panitera Muda Pidana	10	
11	ANUAR GEA, SH, MH	Panitera Muda Perdata	9	
12	ALIUS LASE, S.H.	Panitera Muda Hukum	8	
13	BERLIANNA S.LAIA, S.H	Kasubbag Kepegawain, Organisasi dan Tata Laksana	7	
14	WILPEN F. SIMANUNGKALIT, SH	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	7	
15	SAHAT W. J. SIMORANGKIR, SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	8	
16	IKUTI TELAUMBANUA, SH	Panitera Pengganti	3	
17	RONI SYAHPUTRA WARUWU, SH	Panitera Pengganti	4	
18	YAKUB FRANS SIHOMBING, SH, MH	Panitera Pengganti	3	
19	YOVANI APRILLYA, A.Md.	Panitera Pengganti	3	
20	FENUS J.A. MENDROFA	Jurusita	2	
21	SYAHRIR BUDIMAN	JurusitaPengganti	2	
22	AFFECTION E. GULO, SE	JurusitaPengganti	5	
23	DEYENDI MOLORE MANALU, S.Sos	Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan,	5	
24	HAGAINA MONICA BR TARIGAN, S.H	Analisis Perkara Peradilan	5	
25	FINOLA BR PASARIBU, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	5	
26	ADNAN BRILIAN ULAPIA, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	6	

27	RAHEL O. SIANIPAR, A.Md.A.B	Arsiparis	10	
28	MELVI SINAGA, A.Md.A.B	Pengadministrasi Registrasi Perkara	5	
29	NIKEN NABABAN, A.Md,Ak	Pengelola BMN	7	
30	ANI MARTATINA TELAUMBANUA, A.Md	Pengelola Perkara	7	
31	EKO TARIHORAN, S.T	Teknisi Sarana dan Prasarana	4	
32	DARMAN TOGI ZEBUA, A.Md.,Kom.	Dokumentalis Hukum	4	
33	JIMID HATISARO GEA, A.Md.Pjk.	Dokumentalis Hukum	5	
34	WELIRAMAH HAREFA, A.Md.	Dokumentalis Hukum	4	
35	MELVA SISCAWATTY ZEGA, A.Md	Dokumentalis Hukum	4	
36	WIRNI SANDROTO, S.E	Penata Layanan Operasional	6	
37	YUSNIDAR LASE, S.E	Penata Layanan Operasional	6	
38	MENIATI HURA, S.E	Penata Layanan Operasional	3	
39	APERIANUS MENDROFA, A.MD.	Pengelola Layanan Operasional	3	
40	ASALI LASE	Operator Layanan Operasional	3	
41	FIRMANSYAH	Operator Layanan Operasional		
42	ANFAWAN ZEBUA	Operator Layanan Operasional	2	
43	IKHTIARMAN ZEBUA	Operator Layanan Operasional	3	
44	AGUSMAN LASE	Operator Layanan Operasional	3	

Berikut adalah Profil aparatur Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berdasarkan kepangkatan

Tabel 15. Profil SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

No	Jabatan	PANGKAT/GOL. RUANG															
		IV				III				II				I			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Ketua Pengadilan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hakim	1	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Panitera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Panitera Muda Pidana	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Panitera Muda Perdata	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Panitera Muda Hukum	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Jurusita	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kasubag Umum dan Keuangan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pelaksana	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-
15	PPPK	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		4	1	-	-	10	7	4	4	5	-	7	2	-	-	-	-

A. Mutasi

Tabel 16. Data Mutasi Aparatur PN Gunung Sitoli

No	Nama	Jabatan Lama	Hasil Mutasi	Nomor dan Tanggal SK
1	Dody	WKPN Gunung Sitoli	KPN Kayu Agung	1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 5 01 Oktober 2025

2	Junter	Hakim PN Gunung Sitoli	Hakim PN Brebes	1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/202 5 01 Oktober 2025
---	--------	------------------------------	--------------------	---

B. Promosi

Tabel 17. Data Promosi Aparatur PN Gunung Sitoli

No	Nama	Jabatan Lama	Promosi	Nomor dan Tanggal SK
1	Sahat Wira Josafat Simorangkit, S.E.	Penyusun Laporan keuangan	Kasubbag Umum & Keuangan	24954/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/20 25 28 Agustus 2025
2	Alius Lase, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum	1658/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2025 06 November 2025

C. Pensiun

Tabel 18. Data Pensiun Aparatur PN Gunung Sitoli

No	Nama	NIP	Pangkat/Go I. Ruang	Batas Usia	TMT
	N	I	H	I	L

D. Diklat

Tabel 19. Data Diklat Aparatur PN Gunung Sitoli

No	Nama	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Acara
1	Zulfadly, S.H.,M.H.	1976090620011210 02	Pembina Tk. I IV/b	Ketua	- Pelatihan Niaga Kepailitandan PKPU - Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual - Pelatihan singkat pendalaman

					substansi dan kebaruaran hukum pidana nasional - Pelatihan Temu wicara dibidang kebangsentralan dan sektor jasa keuangan
2	Alfan Perdana, S.H.	1971010719930310 03	Pembina IV/a	Hakim	- Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan - Pelatihan singkat pendalaman substansi dan kebaruaran hukum pidana nasional Hidup Angkatan XXII Tahun 2025
3	Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H.	1988101720171210 02	Penata III/c	Hakim	Pelatihan singkat pendalaman substansi dan kebaruaran hukum pidana nasional
4	Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.	1994030320171210 01	Penata Muda Tk. I III/b	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum dengan metode online
5	Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.	1987100320171210 01	Penata Muda Tk. I	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum dengan metode online
6	Gabriel Lase, S.H.		Penata Muda Tk. I	Hakim	Pelatihan singkat pendalaman substansi dan kebaruaran hukum pidana nasional
7	Adnan Brilian Ulapia, S.H.	1997091320240510 01	Penata muda III//a	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS Gol.III
8	Hagaina MonicaBr	1996051020240520 01	Penata Muda	Analisis Perkara	Pelatihan Dasar CPNS Gol.III

	Tarigan, S.H.		III//a	Peradilan	
9	Finola Br Pasaribu, S.H.	1999060120240520 01	Penata Muda III//a	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS Gol.III
10	Eko Tarihoran, ST	1995122620250610 11	Penata Muda III/a	Teknisi Sarana Dan Prasarana	Pelatihan Dasar CPNS Gol.III
11	Darman Togi Zebua, A.Md.,Kom.	1997051820250610 09	Pengatur II/c	Dokumenta lis Hukum	Pelatihan Dasar CPNS Gol.II
12	Jimid Hatisaro Gea, A.Md.Pjk.	1992101220250620 08	Pengatur II/c	Dokumenta lis Hukum	Pelatihan Dasar CPNS Gol.II
13	Weliramah Harefa, A.Md.	1998090620250620 11	Pengatur II/c	Dokumenta lis Hukum	Pelatihan Dasar CPNS Gol.II
14	Melva Siscawatty Zega, A.Md	1984011020252120 31	Pengatur II/c	Dokumenta lis Hukum	Pelatihan Dasar CPNS Gol.II

A. Surat Keputusan yang telah dikeluarkan selama tahun 2025

No	Surat keputusan	Nomor Sk	Tanggal Sk	Yang menandatangani
1	SK Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata	1/KPN/SK/I/2025	7-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
2	SK Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan	2/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
3	SK Tentang ketentuan jam kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	3/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
4	SK Tentang penetapan pakaian dinas dan tanda pengenal bagi Hakim, aparatur sipil negara dan PPNPN Pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	4/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
5	SK Tentang Pemberitahuan Perkembangan Perkara tertentu kepada KPN	5/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
6	SK Tentang maklumat pelayanan pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	6/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
7	SK Tentang penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mutasi Internal	7/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
8	SK Tentang Pola Mutasi Internal	8/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
9	SK Tentang Pembentukan Tim Zona Integritas (ZI)	9/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
10	SK Tentang Pembagian Tugas KPN dan WKPN	10/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
11	SK Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang	11/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
12	SK Tentang Pedoman Hakim Pengawas Bidang	12/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
13	SK Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	13/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
14	SK Tentang Pejabat, Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas PTSP	14/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
15	SK Tentang penunjukan Humas PN Gunungsitoli	15/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
16	SK Tentang Penunjukan Juru Bicara pada Pn Gunungsitoli	16/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
17	SK Tentang Penunjukan Hakim Mediator	17/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

18	SK Tentang Penunjukan WKPN sebagai Koordinator Pengawas	18/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
19	SK Tentang Penetapan Jadwal Pengawasan Hakim Pengawas Bidang	19/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
20	SK Tentang Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan	20/KPN/SK/I/2025	15-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
21	SK Tentang Penunjukan Tim Penegakkan Displin	21/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
22	SK Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pengamat (Wasmats)	22/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
23	SK Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)	23/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
24	SK Tentang Penunjukan Tim penyusun Standar Pelayanan	24/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
25	SK Tentang Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi SOP	25/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
26	SK Tentang Penunjukan Notulis	26/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
27	SK Tentang Penunjukan Tim PPID	27/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
28	SK Tentang Penunjukan Manajer Supervisi PTSP	28/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
29	SK Tentang Penunjukan Tim Penyusun Dokumen SAKIP	29/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
30	SK Tentang Penunjukan Tim Penyusun Dokumen LKJIP	30/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
31	SK Tentang Penunjukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis	31/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
32	SK Tentang Penunjukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	32/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
33	SK Tentang pembentukan Satgas SIPP	33KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
34	SK Tentang Penunjukan Tim Penilai Reward dan Punishment	34/KPN/SK/I/2025	17-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
35	SK Tentang Penunjukan Plh. Panitera	35/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
36	SK Tentang Pedoman pengaduan masyarakat	36/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
37	SK Tentang Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli	37/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
3	SK Tentang Pemberlakuan SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan	38/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
39	SK Tentang Pembentukan Tim Survei IPK	39/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
40	SK Tentang Pembentukan Tim Survei	40/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan

	IKM			Negeri Gunung Sitoli
41	SK Tentang Penunjukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	41/KPN/SK/KP7.1/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
42	SK Tentang Penunjukan Tim Penanganan Manajemen Resiko	42/KPN/SK/KP7.1/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
43	SK Tentang Penunjukan Tim Pengendalian Gratifikasi	43/KPN/SK/KP7.1/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
44	SK Tentang Penunjukan Petugas Inzage	44/KPN/SK/KP7.1/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
45	SK Tentang Penunjukan Petugas E-court	45/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
46	SK Tentang Penunjukan Tim Penelaah Eksekusi	46/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
47	SK Tentang Penunjukan Juru Bahasa Persidangan	47/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
4	SK Tentang Peunjukan Juru Sumpah Pengadilan	48/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
49	SK Tentang Penunjukan Petugas Kuasa Pengguna Biaya Proses, Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf pelaksana biaya proses	49/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
50	SK Tentang Pembentukan Audit Internal	50/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
51	SK Tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Layanan	51/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
52	SK Tentang Penetapan hari sidang Tipiring	52/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
53	SK Tentang Tim Implementasi E-Berpadu	53/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
54	SK Tentang Petugas Meja Pengaduan dan Operator Siwas	54/KPN/SK/II/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
55	SK Tentang Mediator Non Hakim	55/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
56	SK Tentang Penunjukan Tim Pengendalian Aktivitas Pengadilan	56/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
57	SK Tentang Penunjukan Petugas SP4N-LAPOR	57/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
58	SK Tentang Penunjukan Admin Ampuh	58/KPN/SK/I/2025	22-1-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
59	SK Tentang Penunjukan Tim Pengelola Website, Media Sosial	59/KPN/SK/III/2025	05-3-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
60	SK Tentang Penetapan Pemberlakuan Tandatanganan Elektronik Pimpinan	60/KPN/SK/III/2025	13-3-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

61	SK Tentang Penunjukan Pengurus IKAHI	61/KPN/SK/III/2025	14-3-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
62	SK Tentang Penunjukan Tim Pemilihan Agen Perubahan	62/KPN/SK/III/2025	14-3-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
63	SK Tentang Penunjukan Tim uji Coba Kelayakan Inovasi	63/KPN/SK/III/2025	14-3-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
64	SK Tentang Penetapan Agen Perubahan	64/KPN/SK/IV/2025	14-4-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
65	SK Tentang Pembentukan SPIP	65/KPN/SK/IV/2025	14-4-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
66	SK Tentang Pembentukan Tim Sidang Keliling	66/KPN/SK/IV/2025	14-4-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
67	SK Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Teknis	67/KPN/SK/IV/2025	14-4-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
68	SK Tentang Penunjukan Petugas Resepsionis	68/KPN/SK/IVI/2025	14-4-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
69	SK Tentang Penunjukan Tim Pegawai Antar Bidang	69/KPN/SK/IV/2025	14-4-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
70	SK Tentang Penetapan Biaya Proses	70/KPN/SK/IV/2025	14-4-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
71	SK Tentang SOP Pendaftaran/pemeriksaan perkara Perdata	71/KPN/SK/V/2025	20-5-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
72	SK tentang larangan ke kantin saat jam kerja	72/KPN/SK/V/2025	20-5-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
73	SK Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata	73/KPN/SK/V/2025	23-5-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
74	SK Tentang Penetapan Biaya Proses	74/KPN/SK/V/2025	23-8-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
75	SK Tentang Mutasi Internal atas nama Rahel Ovitalia Sianipar,A.Md.A.B.	75/KPN/SK/V/2025	28-5-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
76	SK Tentang Plh.Ketua PN Gunungsitoli	76/KPN/SK/V/2025	28-5-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
77	SK Tentang Plh.Panitera PN Gunungsitoli	77/KPN/SK/V/2025	28-5-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
78	SK Tentang Penempatan CPNS Atas nama Darman Togi Zebua	78/KPN/SK/VI/2025	02-6-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
79	SK Tentang Penempatan CPNS Atas nama Eko Tarihoran	79/KPN/SK/VI/2025	02-6-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
80	SK Tentang Penempatan CPNS Atas	80/KPN/SK/VI/2025	02-6-2025	Ketua Pengadilan

	nama Jimid Hatisaro Gea			Negeri Gunung Sitoli
81	SK Tentang Penempatan CPNS Atas nama Weliramah Harefa	81/KPN/SK/VI/2025	02-6-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
82	SK Tentang Penempatan CPNS Atas nama Melva Zega	82/KPN/SK/VI/2023	02-6-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
83	SK tentang Petunjuk Teknis pengumpulan Data Kinerja	83/KPN/SK/VI/2025	02-6-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
84	SK tentang Pengamanan sidang/Protokol persidangan	84/KPN/SK/VI/2025	23-6-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
85	SK tentang pemegang kunci kantor	85/KPN/SK/VI/2025	23-6-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
86	SK tentang Reviu Laporan Kinerja	86/KPN/SK/VII/2025	02-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
87	SK tentang Plh. Panitera	87/KPN/SK/VII/2025	02-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
88	SK tentang penetapan jadwal pengawasan antar bidang	88/KPN/SK/VII/2025	07-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
89	SK Tentang pemberlakuan SOP pengawasan antar bidang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	89/KPN/SK/VII/2025	07-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
90	SK Pejabat Pengelola PTSP	90/KPN/SK/VII/2025	07-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
91	SK Petugas pendamping pengguna layanan disabilitas pada PN Gst	91/KPN/SK/VII/2025	07-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
92	SK Pembentukan Susunan Majelis Hakim dan PP	92/KPN/SK/VII/2025	31-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
93	SK tentang Hakim Pengawas Bidang	93/KPN/SK/VII/2025	31-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
94	SK Tentang Hakim Mediator	94/KPN/SK/VII/2025	31-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
95	SK tentang pedoman teknis perencanaan kinerja internal PN Gst	95/KPN/SK/VII/2025	31-7-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
96	SK tentang Hakim Mediator	96/KPN/SK/VIII/2025	08-8-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
97	SK tentang Juru bicara PN Gst	97/KPN/SK/VIII/2025	13-08-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
98	SK tentang pengelola, penanggungjawab dan petugas PTSP	98/KPN/SK/VIII/2025	13-08-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
99	SK tentang pembentukan satgas SIPP	99/KPN/SK/VIII/2025	13-08-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
100	SK Tentang penunjukan Tim pengelola website	100/KPN/SK/VIII/2025	13-08-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
101	SK Tentang Tim Baperjakat	101/KPN/SK/VIII/2025	13-08-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
102	SK tentang Tim penegakkan disiplin	102/KPN/SK/VIII/2025	13-08-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
103	SK tentang Tim evaluasi internal	103/KPN/SK/VIII/2025	13-08-2025	Ketua Pengadilan

		25		Negeri Gunung Sitoli
104	SK tentang penunjukan Plh.Panitera	104/KPN/SK/VIII/2025	13-08-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
105	SK tentang penunjukan Plh.Panitera	105/KPN/SK/IX/2025	08-09-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
106	SK tentang penunjukan Plh.Panitera	106/KPN/SK/IX/2025	22-09-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
107	Sk Pembentukan Susunan Majelis Hakim dan PP	107/KPN/SK/IX/2025	29-09-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
108	SK tentang penunjukan Plh.Panitera	108/KPN/SK/X/2025	03-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
109	SK tentang penunjukan Plh.Panitera	109/KPN/SK/X/2025	13-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
110	SK tentang penunjukan hakim pengawas bidang	110/KPN/SK/X/2025	27-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
111	SK tentang penunjukan tim penelaah eksekusi	111/KPN/SK/X/2025	27-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
112	SK tentang penunjukan Plh.Panitera	112/KPN/SK/X/2025	28-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
113	SK tentang penempatan dan pemberian tugas tambahan PPPK	113/KPN/SK/X/2025	29-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
114	SK Pembentukan Tim Survei IPK	114/KPN/SK/X/2025	29-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
115	SK Pembentukan Tim Survei IKM	115/KPN/SK/I/2025	29-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
116	SK tentang Tim Penusun Reviu Rencana Strategis	116/KPN/SK/X/2025	30-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
117	SK tentang penunjukan Plh. KPN	117/KPN/SK/X/2025	30-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
118	SK tentang penunjukan Plh PN	118/KPN/SK/X/2025	30-10-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
119	SK tentang penunjukan Plh.Panitera	119/KPN/SK/XI/2025	03-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
120	SK tentang PIPK	120/KPN/SK/XI/2025	21-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
121	SK tentang Pembentukan Panitia Seleksi Posbakum	121/KPN/SK/XI/2025	27-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
122	SK tentang pemberlakuan Sistem Informasi Pengadilan secara manual	122/KPN/SK/XI/2025	27-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
123	SK tentang penunjukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis, IKU dan RAK	123/KPN/SK/XI/2025	27-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
124	SK tentang Penggunaan hasil Aktualisasi Penelitian dasar CPNS atas nama Melva Zega	124/KPN/SK/XI/2025	27-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
125	SK tentang Penggunaan hasil Aktualisasi Penelitian dasar CPNS atas nama Weliramah Harefa	125/KPN/SK/XI/2025	27-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
126	SK tentang pembentukan	126/KPN/SK/XI/2025	27-11-2025	Ketua Pengadilan

	penanggungjawab Digitalisasi peminjaman dan pengembalian berkas inaktif	5		Negeri Gunung Sitoli
127	SK tentang Penggunaan hasil Aktualisasi Penelitian dasar CPNS atas nama Jimid GEa	127/KPN/SK/XI/2025	27-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
128	SK tentang Penggunaan hasil Aktualisasi Penelitian dasar CPNS atas nama Darman Togi Zebua	128/KPN/SK/XI/2025	27-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
129	SK tentang penunjukan Plh.Panitera	129/KPN/SK/XI/2025	28-11-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
130	SK tentang Penunjukan Plh. Sekretaris	130/KPN/SK/XII/2025	10-12-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
131	SK tentang Penunjukan Plh. KPN	131/KPN/SK/XII/2025	17-12-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
132	SK tentang Penunjukan Plh. Panitera	132/KPN/SK/XII/2025	18-12-2025	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli



BAB IV

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B IV
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI**

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696/2025 T.A 2025 Tanggal 31 Desember 2025

Tabel 20. Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696 Tahun 2025

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	4.839.110.000	4,465,620,089	373,489,911	92.28
52	Belanja Barang	1,630,365,000	1,613,884,740	16,480,260	98.99
53	Belanja Modal	372,705,000	361,000,000	11,705,000	96.86

1. Belanja Pegawai

Tabel 21. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
51111 1	Belanja Gaji Pokok PNS	1,521,369,000	1,513,562,860	7,806,140	99.49
51111 9	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,000	24,094	6,906	77.72
51112 1	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	99,730,000	99,144,428	585,572	99.41
51112 2	Belanja Tunj. Anak PNS	34,299,000	33,974,624	324,376	99.05
51112 3	Belanja Tunj. Struktural PNS	29,940,000	29,920,000	20,000	99.93
51112 4	Belanja Tunj. Fungsional PNS	190,790,000	180,370,000	10,420,000	94.54
51112 5	Belanja Tunj. PPh PNS	43,273,000	22,915,420	20,357,580	52.96
51112 6	Belanja Tunj. Beras PNS	83,282,000	83,210,580	71,420	99.91
51112 9	Belanja Uang Makan PNS	433,733,000	267,838,000	165,895,000	61.75
51115 1	Belanja Tunjangan Umum PNS	26,510,000	26,475,000	35,000	99.87
51115 7	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	113,400,000	110,700,000	2,700,000	97.62

511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	335,174,000	263,281,311	71,892,689	78.55
511339	Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	1,771,268,000	1,687,500,000	83,768,000	95.27
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	100,201,000	100,108,400	92,600	99.91
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,000	1,980	20	99
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,101,000	8,045,160	55,840	99.31
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,201,000	3,153,992	47,008	98.53
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,901,000	8,835,240	65,760	99.26
511628	Belanja Uang Makan PPPK	29,304,000	20,019,000	9,285,000	68.31
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,540,000	6,540,000	61,000	99.08

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025 senilai **Rp. 4,465,620,089,-** atau 92.28%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 naik dibandingkan realisasi Tahun 2024 senilai **Rp. 3,453,216,611,- atau 94%**. hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

2. Belanja Barang

Tabel 22. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	718,858,000	704,776,900	14,081,100	98.04
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,598,000	15,605,000	1,993,000	88.67
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45,012,000	45,000,000	12,000	99.97
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	0	100
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	0	100
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31,458,000	31,457,560	440	100
522112	Belanja Langganan Telepon	1,104,000	1,025,484	78,516	92.89

522113	Belanja Langganan Air	120,000	45,500	74,500	37.92
522141	Belanja Sewa	3,000,000	3,000,000	0	100
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	371,933,000	371,933,000	0	100
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	124,671,000	124,585,605	85,395	99.93
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	219,791,000	219,641,996	149,004	99.93
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95,820,000	95,813,695	6,305	99.99

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025 senilai **Rp. 1,613,884,740,-** atau **98,99 %**. Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 menurun dibandingkan realisasi Tahun 2024 senilai **Rp. 1,811,375,377,-** atau **99,00 %**. Hal ini dikarenakan penggunaan dana pemeliharaan peralatan dan mesin tidak maksimal

3. Belanja Modal

E. Tabel 23. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372,705,000	361,000,000	11,705,000	96.86

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025 senilai **Rp. 361,000,000,-** atau **96,86%**. Belanja Modal pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2025 yaitu pengadaan 1 unit alat bantu dengar dan 1 unit brandkas, 1 unit kursi ketua, 1 unit kursi wakil ketua, 1 unit kursi panitera, 1 unit kursi sekretaris, 4 unit meja kerja 1 biro, 15 unit meja ½ biro

2. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198/2025 Tanggal 31 Desember 2025

Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198 Tahun 2025

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
52213 1	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,129,000	2,325,000	1,804,000	56.31
52121 1	Belanja Bahan	42,165,000	33,232,000	8,933,000	78.81
52181 1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,900,000	19,834,000	66,000	99.67
52213 1	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	36,000,000	0	100
52411 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	128,250,000	80,200,000	48,050,000	62.53
52411 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,514,000	9,229,500	3,284,500	73.75

Realisasi Belanja Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA -03 Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2025 senilai **Rp 300,251,089,-** atau **97 %**.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Pengelolaan sarana dan prasarana

a. Pengadaan

Tabel 25. Pengadaan Tahun 2025

Uraian	Realisasi
1	2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 361,000,000, -
Jumlah	Rp. 361,000,000,-

b. Pemeliharaan

Tabel 26. Pemeliharaan Tahun 2025

Uraian	Realisasi
1	2
Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp. 371,933,000,-
Pemeliharaan Gedung & Bangunan Lainnya	Rp. 124,585,605,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 219,641,996,-
Jumlah	Rp. 716,160,601,-

c. Penghapusan

Tabel 27. Penghapusan Tahun 2025

Uraian	Realisasi
1	2
Peralatan Mebelair	Rp. 659.888.802,-
Jumlah	Rp. 659.888.802,-

d. Daftar Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Tabel 28. Keadaan Perangkat Keras Tahun 2025

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Ket
	Pos Jaga	1	
	Parkir Roda 4 dan Roda 2	2	
	Mushola	1	
	Kantin	1	
	Gudang	1	
I	Gedung Utama		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang JuruSita	1	
5	Ruang Panitera/Jurusita	1	
6	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
7	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
8	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
9	Ruang Sekretaris	1	
10	Ruang PTIP	1	
11	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	
12	Ruang Umum dan Keuangan	1	
13	Ruang Arsip	1	
14	Ruang Perpustakaan	1	
15	Ruang Sidang Umum	3	
16	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
17	Ruang Diversi / Mediasi	1	
18	Ruang Tahanan	2	
19	Ruang Tunggu Jaksa	1	
21	Ruang Menyusui/Laktasi	1	
22	Ruang Posbakum	1	
23	Ruang Command Center	1	

III Fasilitas			
1	PC Unit	22	
2	Personal Komputer lainnya	3	
3	Laptop dan notebook	14	
4	Printer	14	
5	Scanner	4	
6	LCD Projector/Infocus	1	
7	Pesawat Telephone	1	
8	AC	13	
9	Genset	1	
10	CCTV	2	
11	Server	2	
12	Rak Server	1	
13	Telephone Fax	1	
14	Lemari kayu	4	
15	Rak Besi Arsip	3	
16	Brankas	1	
17	Internet	1	Astinet 1:1 Indie Home 70Mbps
18	Lemari Besi Metal	8	
19	Filling Cabinet Besi	6	
20	Televisi	1	
21	Kursi Dorong	145	

F. Kendaraan Dinas

Tabel 29. Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Perolehan	kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	MiniBus	2005	v			
2	MiniBus	2009	v			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	YAMAHA	1997			v	
2	HONDA	2005	v			
3	HONDA	2005	v			
4	HONDA	2007	v			
5	HONDA	2008	v			
6	HONDA	2008	v			
7	HONDA	2008	v			
8	HONDA	2008	v			

G. Rumah Dinas

H. Tabel 30. Keadaan Rumah Dinas Tahun 2025

No	Nama Barang	Luas	Keterangan
1	2	3	4
1	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
2	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	240	Rumah Dinas ketua
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1961	Kantor
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Wakil Ketua
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Sekretaris
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Panitera
10	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	100	Teluk Dalam Nias Selatan
11	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	100	Pulau Tello Nias Selatan

I. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan public menuju layanan prima, dengan mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah membuat terobosan inovasi yang merupakan hasil karya dari Team IT Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Inovasi muncul karena Belum Optimalnya layanan Pencatatan dan Pendistribusian ATK Untuk masing -masing Bidang didasari oleh Belum tersedianya sistem digital atau aplikasi khusus untuk pencatatan dan distribusi ATK pada Pengadilan negeri Gunung Sitoli. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini muncullah gagasan kreatif “Optimalisasi Layanan Pencatatan dan Distribusi ATK dengan Sistem Digital Pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli” pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

Optimalisasi layanan pencatatan dan distribusi ATK melalui penerapan sistem digital memberikan berbagai manfaat strategis bagi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Sistem digital mampu meningkatkan efisiensi administrasi dengan mempercepat proses pencatatan, permintaan, dan penyaluran ATK secara terintegrasi serta mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Selain itu, akurasi data menjadi lebih terjamin karena meminimalkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan duplikasi informasi. Penerapan sistem digital juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ATK, sehingga setiap penggunaan dan distribusi dapat dipantau secara real time dan terdokumentasi dengan baik. Dari sisi pengawasan, pimpinan dan bagian terkait dapat dengan mudah melakukan monitoring stok, perencanaan kebutuhan, serta pengendalian anggaran secara lebih efektif. Secara keseluruhan, optimalisasi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan internal, tertib administrasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga terus membenahi infrastruktur untuk mendukung peradilan dengan berbasis kepada Teknologi Informasi, dalam hal persidangan secara online, semenjak dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 terkait administrasi persidangan secara online, Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga telah siap untuk menjalankan peraturan tersebut sehingga persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara online, baik di

persidangan yang diadakan di Kota Gunungsitoli ataupun di Teluk Dalam Nias Selatan. Terkait pengembangan kompetensi, Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga tetap konsisten mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI meskipun dilaksanakan secara online/daring. Hal ini berimbas kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, aparaturnya diwajibkan memiliki kemampuan dalam hal teknologi informasi agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

Adapun layanan yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut ;

- Website Resmi PN Gunungsitoli : www.pn-gunungsitoli.go.id
- Sistem Pendaftaran Antrian Online
- Sistem Informasi Pelayanan Online PN Gunungsitoli (E-SIMPONI)
- Sistem Informasi Pelayanan Online melalui Whatsapp (SIMPOWA)
- Mesin Antrian dan Sistem Antrian
- ATK dengan Sistem Digital
- E-Court
- Eraterang
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Sistem Informasi Perpustakaan
- Sistem Informasi Persuratan (PTSP)
- Sistem Informasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Pengadilan Negeri Gunungsitoli kedepannya akan terus berusaha mengembangkan dan menciptakan inovasi demi memberikan pelayanan public yang professional dan bermutu.

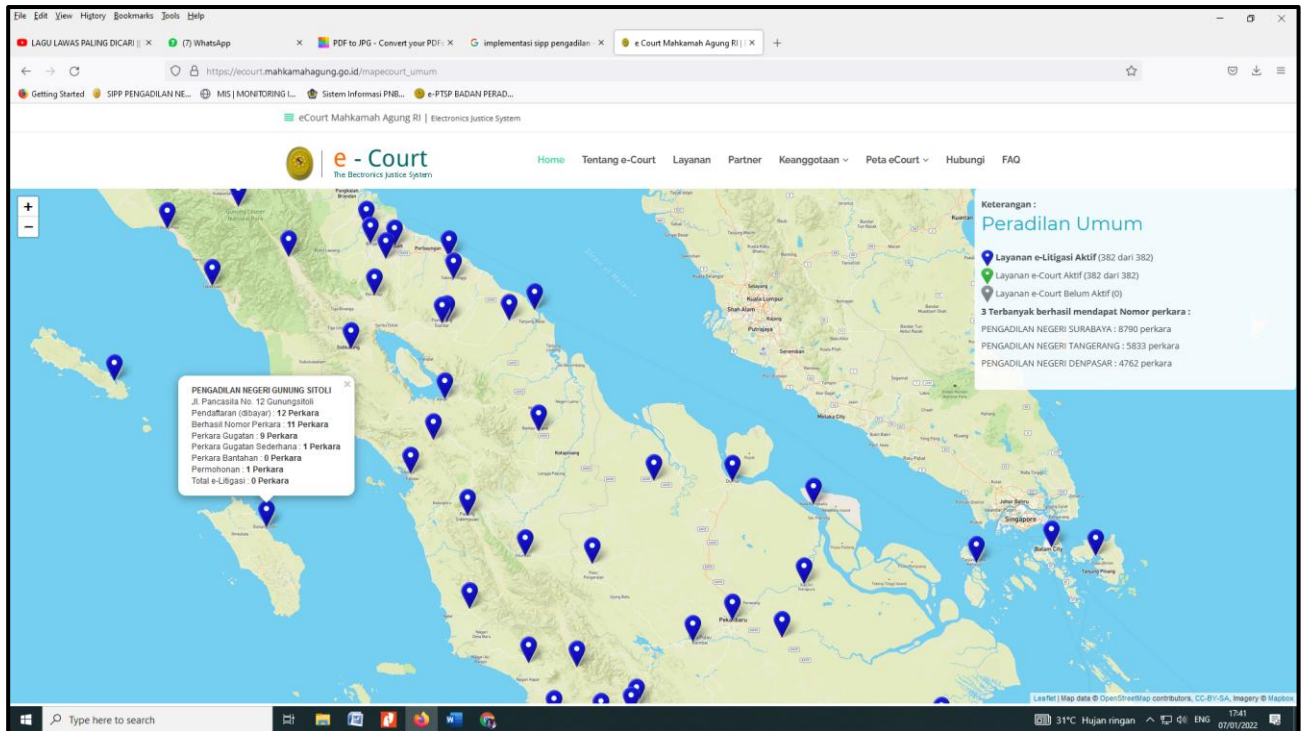
1. Implementasi e-Court

Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah tersedia pojok e-Court dan petugas pelayanan serta admin e-Court. Selama e-court berjalan Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mendapatkan 12 perkara yang di jalankan dengan menggunakan e-court dan telah putus 1 perkara . Namun dari ke 12 perkara, 1 perkara pendaftaran ditolak dikarenakan berkas yang belum lengkap.

Pojok E-Court PN Gunungsitoli



Aplikasi E-Court

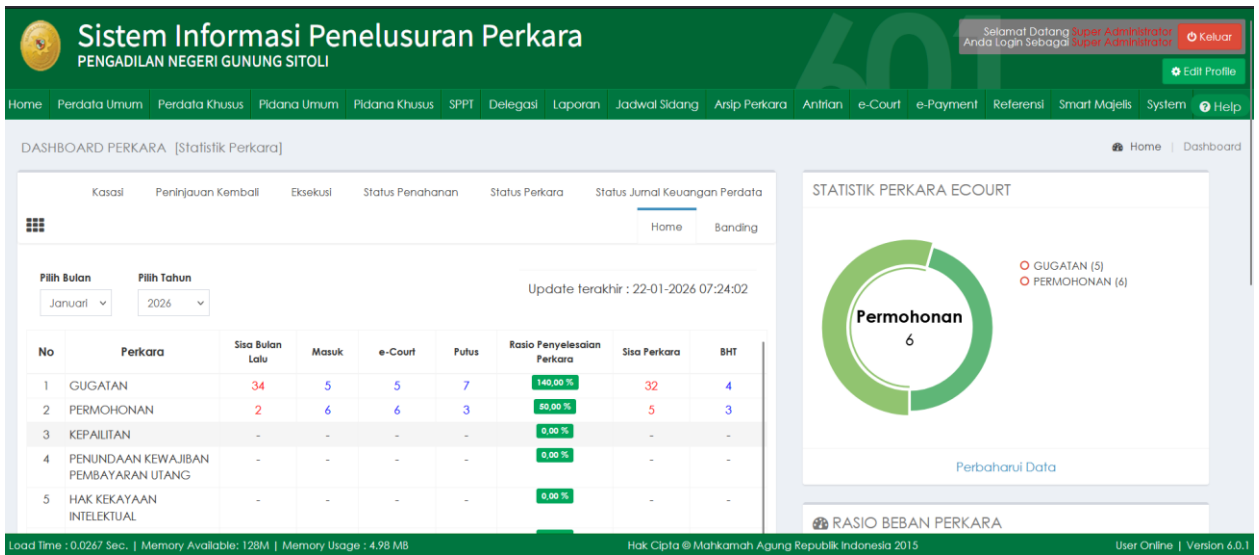


2. Implementasi SIPP

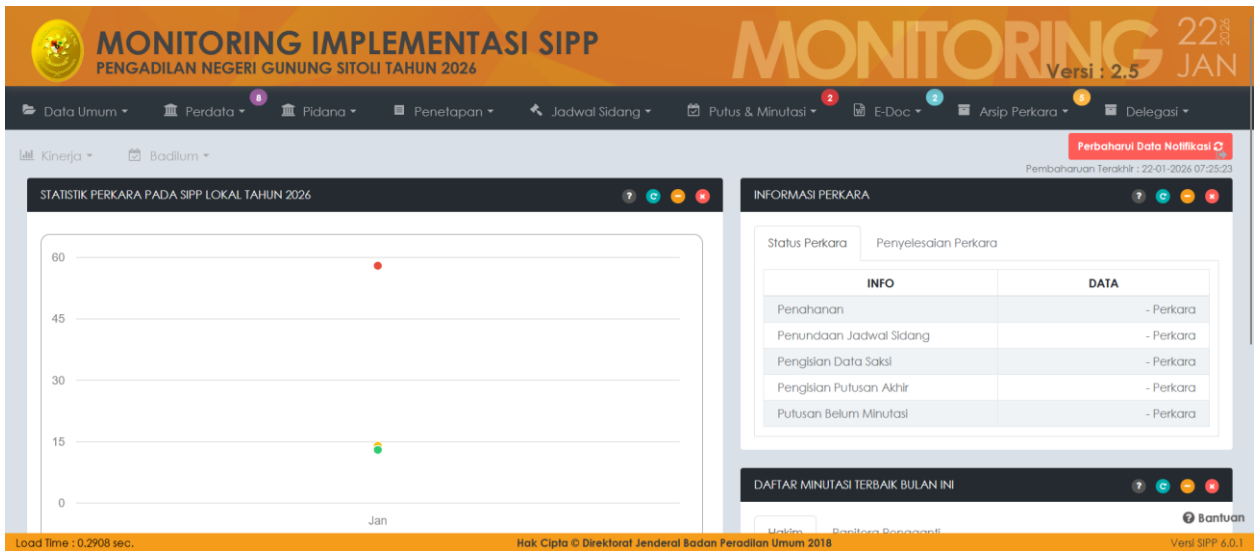
Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dilaksanakan dengan baik sepanjang tahun 2022 dengan Nilai Implementasi Akhir dari Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yaitu sebesar 84,97%. Namun detail dari Implementasi SIPP belum dapat dilihat dari website Evaluasi Implementasi SIPP dikarenakan sedang mengalami pemeliharaan dan perbaikan aplikasi.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga telah melakukan update versi terbaru dari SIPP yaitu versi 6.0.1 demikian pula dengan Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP juga telah diupdate ke versi 6.0.1.

Screenshoot SIPP Versi 6.0.1



Screenshoot MIS Versi 6.0.1





BAB V

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjamin Mutu

Akreditasi penjaminan mutu Indonesia *Court Performance Excellent (ICPE)* merupakan ISO Plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellent (IFCE)* melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standart pengawasan Badan Pengawasan MA dan standart penilaian Direktort Jenderal Badilum tahun 2014.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai dengan standart sertifikasi ISO 9001 : 2008. Tujuan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu pada setiap badan Peradilan di Indonesia, khususnya Badan Peradilan Umum adalah untuk mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (*Indonesia Court Performance Excellent-ICPE*).

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan langkah-langkah pembenahan yang melibatkan semua unsur, mulai dari unsur Pimpinan sampai dengan tenaga honorer di PN Gunungsitoli. Beberapa langkah tersebut adalah :

***Pertama* : Pembinaan dan sosialisasi terus menerus.**

Pembinaan ini berfungsi untuk memastikan semua Hakim dan Pegawai bekerja demi mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransfromasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*). Pembinaan di PN Gunungsitoli dilakukan secara berkala, untuk pembinaan Hakim Pengawas terhadap Bagian yang diawasinya dilakukan sebulan sekali yakni setiap awal bulan. Rapat bulanan dilakukan setiap awal bulan, rapat khusus Panitera dengan para Panitera Muda dilakukan setiap bulan, demikian juga rapat khusus antara Sekretaris dan para Kasubag dilakukan setiap bulan, serta rapat khusus Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan dengan para tenaga honorer di PN Gunungsitoli yang dilakukan setiap bulan juga.

***Kedua* : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.**

Hakekat akreditasi yaitu pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi. Permulaannya yaitu dengan membentuk Tim Reformasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Perpres Nomor

81 Tahun 2000 tentang Grand Design RB, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.

Ketiga :Pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan zona integritas berpedoman pada Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intgritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Seyogyanya penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pemerintah daerah.

Keempat pembenahan sarana pelayanan publik.

Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna. Misalnya meja pelayanan terpadu, ruang sidang anak, ruang ramah anak, ruang tahanan laki-laki dan perempuan, ruang penuntut umum, ruang ibu menyusui, ruang mediasi, ruang kaukus, ruang pengunjung berikut fasilitasnya, ruang tamu terbuka, ruang posbakum, sarana *difable*, tempat parkir pengunjung dan mobil tahanan, serta tempat merokok.

Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Bila DIPA mengalokasikan, lengkapi dengan televisi di ruang pengunjung, CCTV, tabung pemadam kebakaran ringan (apar) dan genset. Tetapi bila belum, maka segera lakukan perencanaan (*strategic planning*) pengadaannya.

Kelima pembenahan administrasi.

Acuannya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari sering belum diterapkan dan meja informasi tidak sesuai Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.

Keenam pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu.

Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, Instruksi Kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Penyusunan SOP berpedoman pada Persekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Seyogyanya tim penyusun SOP adalah unit yang bersangkutan.

Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Badan peradilan umum telah memberikan contoh manual mutu, sehingga penyusunan tinggal menyesuaikan. Perihal sistem manajemen bekerja dituangkan dalam IK atau SOP. Tapi lebih baik menggunakan IK, karena SOP harus dalam format diagram alir bercabang (*branching flowchart*) sebagaimana ditentukan Persekma No. 002 Tahun 2012, sehingga menyusun IK lebih mudah daripada menyusun SOP. Di PN Gunungsitoli, terdapat 18 (delapan belas) IK, diantaranya IK manajemen representif, IK pengendalian dokumen, IK tinjauan manajemen, IK audit internal dan IK survei kepuasan pengguna.

Ketujuh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi LENTERA, Sisuper (Survey IKM dan IPK) dan PERKUSI (Eksekusi) tanggal 8 April 2021, Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, diperoleh nilai indeks sebesar 4,00 atau setara dengan 100,00%, dengan kategori "Sangat Baik". Jumlah responden yang berpartisipasi dalam survei ini sebanyak 37 orang, yang terdiri dari 32 responden laki-laki dan 5 responden perempuan.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, responden didominasi oleh lulusan SMU sebanyak 17 orang, diikuti oleh lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 16 orang, dan Strata 2 (S2) sebanyak 3 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan, responden terdiri dari berbagai latar belakang, antara lain pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai swasta, serta kategori lainnya yang merupakan jumlah terbanyak.

Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB telah memenuhi harapan dan dilaksanakan secara optimal.

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi menunjukkan nilai indeks sebesar 4,00 atau 100,00%, dengan kategori “Sangat Baik”. Jumlah responden pada survei ini sebanyak 34 orang, yang terdiri dari 29 responden laki-laki dan 5 responden perempuan.

Dari sisi pendidikan, responden mayoritas berasal dari lulusan SMU dan Strata 1 (S1), masing-masing sebanyak 15 orang, serta Strata 2 (S2) sebanyak 3 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan, responden berasal dari unsur PNS, TNI, POLRI, pegawai swasta, serta kategori lainnya.

Hasil tersebut mencerminkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang sangat baik terhadap upaya pencegahan korupsi, transparansi, serta integritas aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Periode 1 April 2025 sampai dengan 30 Juni 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB memperoleh nilai indeks 4,00 (100%) dengan kategori Sangat Baik pada Survei Kepuasan Masyarakat.
2. Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB juga memperoleh nilai indeks 4,00 (100%) dengan kategori Sangat Baik pada Survei Persepsi Anti Korupsi.
3. Hasil ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi serta kepercayaan publik terhadap integritas dan komitmen anti korupsi aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

Tabel 31. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan 4 Tahun 2025.

No.	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Ranking
1	Persyaratan	4,000	Sangat Baik	1
2	Prosedur	4,000	Sangat Baik	2
3	Waktu Pelayanan	4,000	Sangat Baik	3
4	Biaya/Tarif	4,000	Sangat Baik	4
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000	Sangat Baik	5
6	Kompetensi Pelaksana	4,000	Sangat Baik	6
7	Perilaku Pelaksana	4,000	Sangat Baik	7
8	Prasarana, Sarana dan Kelengkapan	4,000	Sangat Baik	8
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,997	Sangat Baik	9

4. **data diambil dari aplikasi e-survey.badilum.mahkamahagung.go.id*



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

JUMLAH	37 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 32 ORANG	
	PEREMPUAN : 5 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 1 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 16 ORG
	SMU : 17 ORG	S2 : 3 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 4 ORG	SWASTA : 8 ORG
	TNI : 1 ORG	WIRUSAHA : 0 ORG
	POLRI : 5 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 19 ORG	

JUMLAH	34 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 29 ORANG	
	PEREMPUAN : 5 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 1 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 15 ORG
	SMU : 15 ORG	S2 : 3 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 4 ORG	SWASTA : 6 ORG
	TNI : 1 ORG	WIRUSAHA : 0 ORG
	POLRI : 4 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 19 ORG	

4,00/100,00%
SANGAT BAIK

**NILAI
SKM**

**NILAI
SPAK**

4,00/100,00%
SANGAT BAIK

Kedelapan pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Kesepuluh audit oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan audit oleh AMPUH Badilum, maka harus meminta audit oleh Pengadilan Tinggi Medan. Rekomendasi Pengadilan Tinggi harus segera ditindak lanjuti. Apabila Pengadilan Tinggi menganggap pengadilan tingkat pertama memenuhi syarat untuk dilakukan audit akreditasi, maka dapat ditindaklanjuti dengan memohon audit akreditasi AMPUH Mahkamah Agung.

Kesebelas audit akreditasi AMPUH. Semestinya dengan telah dilakukan audit internal dan pre audit PT, maka akan minim ketidaksesuaian. Terdapat tingkatan predikat berdasarkan skor, seperti: Paripurna (Tertinggi), Unggul, Utama, Baik, Cukup (Terendah).



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor TAPM.120 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KELAS IB

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

"A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


PRIM HARYADI

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah aktif sejak tanggal 01 Oktober 2017. Awalnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih dalam bentuk loket-loket. Namun setelah Pelayanan Terpadu di PN Gunungsitoli aktif, maka telah ditetapkan empat orang petugas di meja layanan terpadu, yakni : petugas untuk Kepaniteraan Pidana, petugas untuk Kepaniteraan Perdata, petugas untuk Kepaniteraan Hukum dan petugas untuk Bagian Umum dan Keuangan.

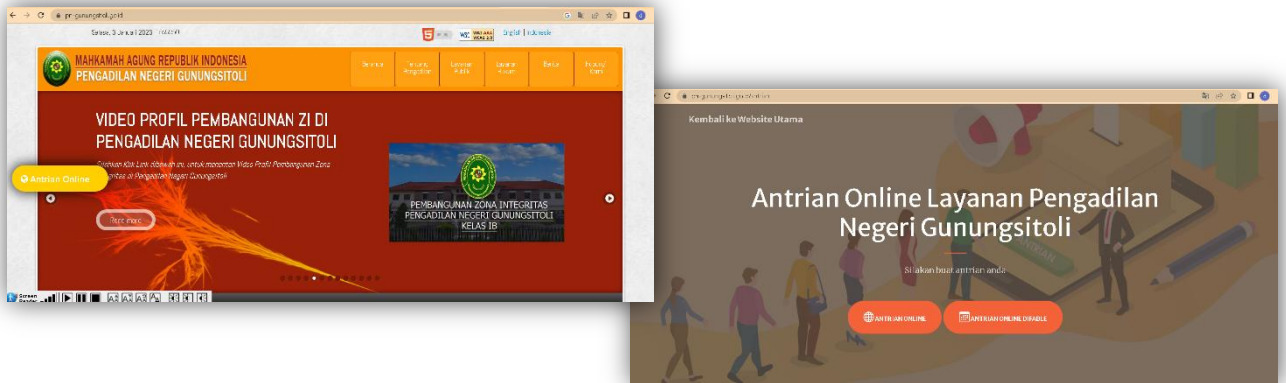


C. Inovasi Pelayanan publik

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan peran sebagai badan peradilan umum, terus melakukan inovasi dalam pengembangan aplikasi untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kab. Nias. Adapun aplikasi atau kegiatan yang ditujukan dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut ;

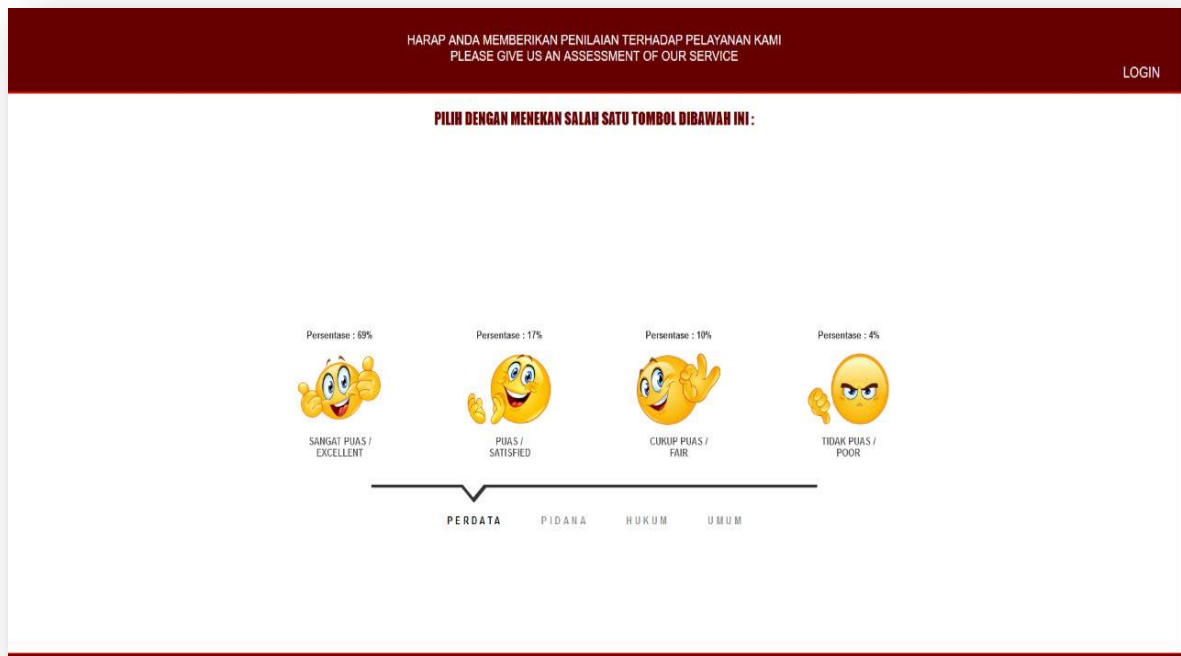
1. Sistem Pendaftaran Antrian Online

Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki aplikasi system Pendaftaran Antrian Online, yang terbagi 2 bagian, untuk umum dan difabel yang berguna untuk memudahkan pelayanan public, sehingga masyarakat yang akan datang ke kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah bisa mendapatkan no antrian secara online melalui perangkat handphone.



2. Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga memiliki inovasi dalam mengembangkan aplikasi untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat Kab. Nias terhadap pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Aplikasi ini telah digunakan dan dapat di monitoring untuk pembuatan laporan indeks kepuasan masyarakat



3. Aplikasi E-SIMPOWA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki daerah cakupan hukum yang luas sehingga banyaknya masyarakat yang ingin mencari informasi tentang pelayanan di pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli berinovasi untuk menciptakan layanan komunikasi yang dapat diakses dan memudahkan masyarakat di Kab. Nias dalam mencari informasi seputar pelayanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun inovasi yang dibuat adalah E-SIMPOWA (Sistem Informasi Pelayanan Online Melalui Whatsapp) yang akan membalas otomatis pertanyaan dari masyarakat seputar pelayanan peradilan. Layanan ini dapat diakses menggunakan aplikasi whatsapp. Layaknya berinteraksi dengan sesama pengguna whatsapp, layanan ini akan dibalas otomatis oleh system yang telah dirancang oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dan layanan ini telah dapat digunakan oleh masyarakat sekitar Kab. Nias dengan menghubungi atau menambahkan kontak whatsapp 0822 4706 7035 (Whatsapp Pengadilan Negeri Gunungsitoli).

Screenshoot Aplikasi

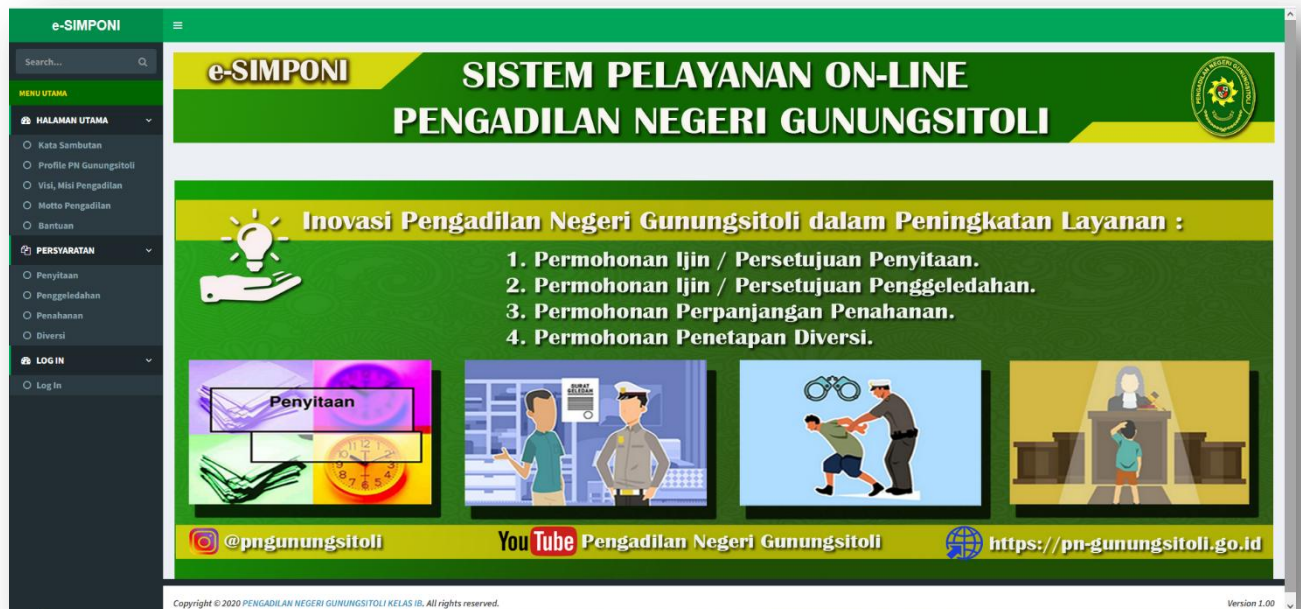


4. Aplikasi E-SIMPONI

Dalam rangka modernisasi pelayanan peradilan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli membuat sebuah inovasi yang ditujukan untuk pihak Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pemerintahan dan BNN serta instansi terkait. Pelayanan ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengurusan ijin penyitaan, ijin penggeledahan, perpanjangan penahanan dan diversifikasi, seluruh pelayanan tersebut dilakukan secara online melalui aplikasi E-SIMPONI dengan alamat URL : www.simponi.pn-gunungsitoli.go.id. Aplikasi ini sendiri diluncurkan pada bulan Mei 2021, dan pada saat itu aplikasi ini masih menggunakan Google Docs sebagai sarana pengiriman dokumen sehingga dirasa perlu ditingkatkan ke tahap yang lebih baik. Pada bulan September 2021 aplikasi E-SIMPONI selesai diupgrade sehingga sudah menggunakan sistem informasi dan pemrograman yang dirancang untuk memudahkan pengiriman dokumen. Hingga saat ini tercatat sudah ada lebih dari 150 permohonan

yang masuk dari beragam instansi. Aplikasi ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengembangkan lebih banyak inovasi pelayanan public, ke depannya Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga memiliki rencana untuk membuat aplikasi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas pada pelayanan yang ada.

Screenshoot Aplikasi

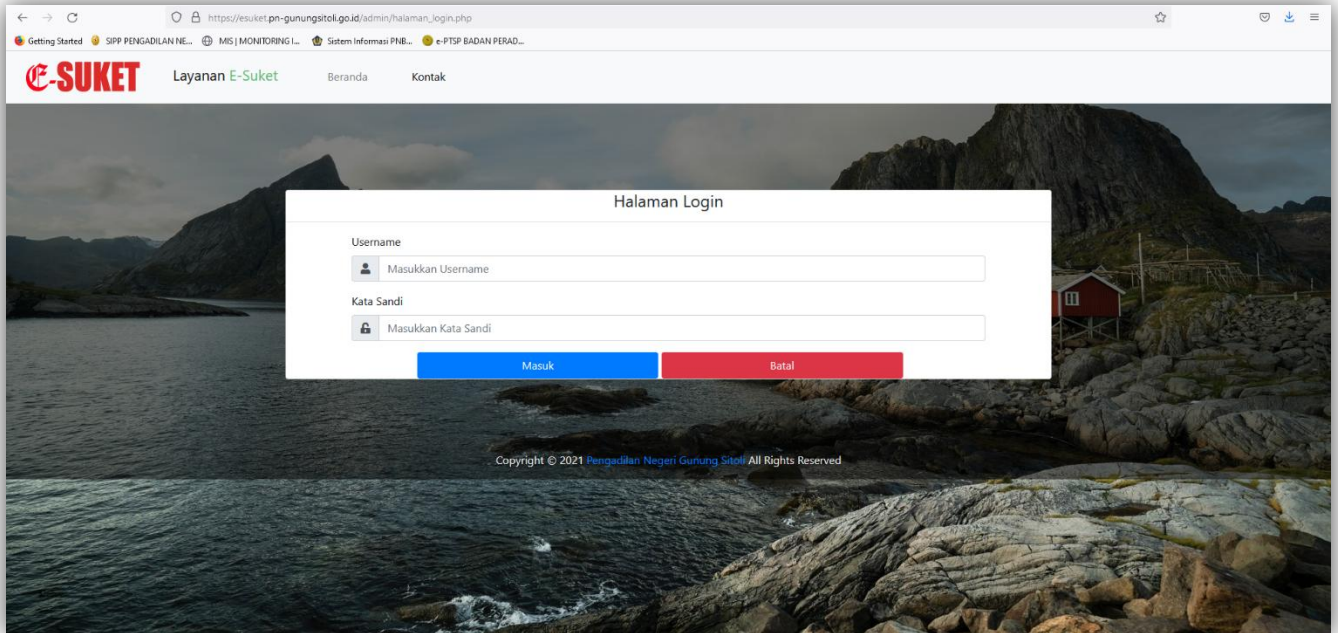


5. Aplikasi E-SUKET

Pengadilan Negeri Gunungsitoli kini telah memiliki terobosan inovasi terbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan tanpa harus datang ke kantor. Inovasi tersebut diberi nama E-SUKET atau Elektronik Surat Keterangan. Aplikasi E-SUKET ini dihadirkan untuk menghadirkan pelayanan digitalisasi kepada masyarakat. Kemudahan yang diberikan ialah, Pemohon Surat Keterangan tidak diwajibkan hadir ke Kantor PN untuk mengurus Suket, cukup dari rumah dan menggunakan Laptop/HP, Suket bisa didapatkan dengan ketentuan dan syarat berlaku. Hal ini demi memangkas birokrasi yang riwet dan menghindari terjadinya percaloan dalam pengurusan surat keterangan. Aplikasi ini telah dirilis sejak bulan Oktober tahun 2021 dan mendapat antusias yang sangat tinggi dari masyarakat Kepulauan Nias. Dalam kegiatan launching nya, Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga telah mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait bahwa output dari E-SUKET yang berupa Surat Keterangan Elektronik ialah sah dan resmi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun link untuk mengakses website aplikasi E-SUKET ialah www.esuket.pn-gunungsitoli.go.id. Aplikasi ini juga bergantung kepada aplikasi Eraterang yang merupakan inovasi dari Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI sebagai aplikasi

pengajuan permohonan surat keterangan. Selanjutnya aplikasi E-SUKET digunakan untuk mendapatkan output dari Surat Keterangan Elektronik yang telah di mohonkan.

ScreenShoot Aplikasi





BAB VI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B VI

PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat PN Gunungsitoli :

Tabel 32. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Jabatan/Gol Ruang	Nama Hakim
1	Koordinator Pengawas dan Pembinaan Keaniteraan dan Kesekretariatan	Hakim /Penata Tk I (III/d)	Alfan Perdana, S.H.
2	Pengawas Bidang Pidana	Penata (III/d)	Alfan Perdana, S.H.
3	Pengawas Bidang Perdata	Penata (III/d)	GABRIEL LASE, S.H.
4	Pengawas Bidang Hukum	Penata (III/d)	ROBERTO SIANTURI, S.H.
5	Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Penata (III/d)	HENGKY ALEXANDER YAO, S.H.,M.H
6	Pengawas bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Penata (III/d)	BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBOLON, S.H.
7	Pengawas bidang TI, Pelaporan dan Perencanaan	Penata (III/d)	Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan mengawal hasil kegiatan
3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan

4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

B. Pengawasan Evaluasi

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2025 :

Tabel 33. Rekapitulasi Pengaduan di PN Gunungsitoli Tahun 2025

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	-
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	-
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	-
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Pengadilan Tk. Banding	-
6	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
7	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	-

Berdasarkan data pada tabel diatas disimpulkan bahwa pengaduan yang diterima pada tahun 2025 nihil. Untuk jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Bawas Mahkamah Agung RI dan jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah pengaduan yang ditangani, jumlah pengaduan yang telah telah selesai ditangani LHP disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah pengaduan yang terlapornya dijatuhi hukuman disiplin semuanya nihil.

Adapun evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen peradilan :
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan pencapaian target;
 - c. Pengawasan dan pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor yang mendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Adminitrasi perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;;
 - b. Proedur penerimaan permohonan banding, kasasi, PK dan grasi;
 - c. Keuangan perkara;
 - d. Pemberkasan kearsipan dan pelaporan.
3. Adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Sistem pembagian perkara;
 - b. Penentuan majelis hakim;
 - c. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - d. Minutasi perkara.
4. Administrasi umum :
 - a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Umum (inventaris barang milik negara, perpustakaan, tata persuratan dan perkantoran serta kebersihan dan keamanan kantor).
5. Kinerja pelayanan publik :

- a. Pengelolaan manajemen;
- b. Mekanisme pengawasan;
- c. Kepemimpinan;
- d. Pembinaan dan pengembangan SDM;
- e. Perawatan dan pemeliharaan inventaris;
- f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
- g. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara;
- h. Tingkat pengaduan masyarakat.



BAB VII

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
3. Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi di dunia peradilan, maka dunia peradilan harus segera memperbaiki kinerja dan berfikir sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan guna terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung;
4. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah diupayakan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum.

B. REKOMENDASI

Untuk menghadapi tahun 2026 ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berharap ada perbaikan dan penambahan pegawai dan fasilitas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu:

1. Diharapkan agar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli diberikan tambahan hakim dan Pegawai;
2. Diharapkan agar pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi terus dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme aparat peradilan.
3. Dimohonkan agar diberikan aset BMN seperti meubelair, printer, laptop/PC dan peralatan persidangan teleconference untuk menunjang lancarnya kegiatan kinerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Gunungsitoli, 04 Januari 2026

KETUA PENGADILAN GUNUNGSITOLI



Zulfady, S.H., M.H.
NIP. 197005222001121001



LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
NOMOR : 23/KPN/ SK/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Laporan Tahunan 2025 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Gunung Sitoli perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2025 ;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;



7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Pemerintah.
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI:

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli ;

KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Penyusun Laporan Tahunan adalah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Gunung Sitoli, 13 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Zulfadly




Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Nomor : 23/KPN/SK/I/2026
Tanggal : 13 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Zulfadly, S.H.,M.H. 197609062001121002	Ketua	Penanggungjawab
2	Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H. NIP. 198810172017121002	Hakim	Ketua Tim
3	Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.	Hakim	Wakil Ketua Tim
4	Leotua H.Tampubolon, S.H.,M.H. 197101071993031003	Panitera	Koordinator Pelaksana Kepaniteraan
5	Erwin Harefa, S.H. 197212211993031002	Sekretaris	Koordinator Pelaksana Keseekretariatan
6	Trisman Zandroto 196812291989031002	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Anuar Gea, S.H..M.H. 197307121993031001	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Alius Lase, S.H. 198508132009041004	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	Berlianna Seniwati Laia, S.H. 198403312009042006	Kepala Subbagian Kepegawaian , Organisasi & Tatalaksana	Anggota
10	Wilpen F. Simanungkalit, S.Kom 198511092009121001	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Sekretaris
11	Sahat Wira Josafat Simorangkir, S.E 199209222015031001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Operasional	Anggota
12	Deyendi Molore Manalu, S.Sos 199410072022031006	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator

Gunung Sitoli, 13 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Zulfadly

